

PERAN KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MAKMUR JAYA KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Arif Rahman Hakim¹, Iman Surya², Nur Hasanah³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, hal ini ditekankan mengingat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Makmur Jaya masih jauh dari kata maksimal, serta untuk mengetahui kendala Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Makmur Jaya berjalan dengan baik sesuai dengan 3 indikator peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi pembangunan desa yaitu. melalui indikator motivator mendorong atau memotivasi masyarakat agar terlibat dalam pembangunan fisik dan kegiatan gotong royong, indikator fasilitator bahwa kepala desa sebagai fasilitator selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna seperti halnya tempat pertemuan. Seperti balai desa yang difasilitasi kepala desa guna membahas mengenai pembangunan-pembangunan untuk yang ada di Desa Makmur Jaya. Indikator mobilisator menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa misalnya melakukan kerja bakti, meningkatkan aparatur perangkat desa dan menggerakkan masyarakat dalam pertemuan desa. Sementara Kendala Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten kutai Timur adalah pekerjaan dan fasilitas dan peralatan yang masih kurang maksimal.

Kata Kunci: *Peran, kepala desa, partisipasi, masyarakat, pembangunan.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rahman_arif222@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.6 Tahun 2014 dikatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Kepala desa adalah sebagai administrator pembangunan pada bidang pemerintahan, administrator pada bidang kemasyarakatan, administrator pada bidang ekonomi, administrator pada bidang keamanan dan ketertiban, dan administrator pada bidang-bidang hukum dan adat Konsekuensi dari kenyataan tersebut, pemerintah desa (Kepala Desa) harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kevakuman. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014 “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga

terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut agar tercipta asas *check and balances* yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal di atas untuk memperkuat dan mempertegas penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Menurut pengamatan sementara penulis, di Desa Makmur Jaya terlihat partisipasi masyarakat masih kurang, hal ini disebabkan pertama, kurangnya pembinaan dan motivasi kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti ajakan dan himbauan untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan, kerja bakti membangun jalan. Serta jarang nya pemerintah desa atau kepala desa turun langsung menemui masyarakat, mendengar keluhan masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Makmur Jaya, dikarenakan Kepala Desa Makmur Jaya jarang di tempat atau sering keluar dinas. Kedua, kurang pedulinya masyarakat terhadap pembangunan desa menganggap pembangunan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal seharusnya dalam pembangunan masyarakat lebih banyak menyertakan untuk ikut serta, ini dikarenakan masyarakat di Desa Makmur Jaya merupakan petani kebun sawit dimana mereka pagi pergi ke kebun untuk mengurus tanamannya dan pulang sore sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus pembangunan dan menyerahkan semua kepada pemerintah desa. Pembangunan desa seharusnya lebih banyak menyertakan masyarakat untuk ikut serta namun kenyataan yang didapati dilapangan berbeda dengan apa yang diharapkan. Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul “Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Merton (Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut, peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. (<http://www.artikelsiana.com>).

Kepala Desa

Saparin dalam Hanif Nurcholis (2011:9) Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan Kepala Desa yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, oleh karena itu Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya roda pemerintahan pemerintahan yang ada di Desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Dengan berbagai kenyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakat ia perlu dibantu oleh perangkat desa untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya dengan aparat yang lainnya.

Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201- 202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R. Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Pembangunan

Pembangunan memiliki arti ganda. Makna pertama adalah pembangunan yang lebih memberikan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth/economic development*), yang lebih memfokuskan pada jumlah/kuantitas produksi dan penggunaan sumber-sumber. Keberhasilan pembangunan dari perspektif ini dilihat dari tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB). Makna kedua adalah bahwa pembangunan itu lebih memusatkan perhatian kepada perubahan dalam distribusi barang-barang dalam esensi hubungan sosial. Dalam perspektif ini fokus perhatian adalah pembangunan sosial (*social development*) dimana fokusnya pada perubahan distribusi kualitatif dalam struktur masyarakat melalui penghapusan diskriminasi, eksploitasi, dan penciptaan dan jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi diantara masyarakat. Prinsipnya adalah bahwa masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah mereka

sendiri, merumuskan pemecahan masalah dan menerapkan solusi yang mereka pilih (Sudharto P. Hadi, 2001).

Pembangunan Fisik

Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti:

1. Jalan
2. Jembatan
3. Pasar
4. Pertanian dan
5. Irigrasi

Pembangunan non fisik

Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2002:114) oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu :

1. Pembangunan manusia
2. Ekonomi
3. Kesehatan
4. Pendidikan

Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinantertuntaskan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan dalam mewujudkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup dilingkungan non-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya :

1. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional
2. Terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal).
3. Belum tersusunya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif,
4. Belum terbangunya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas,

Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan, dan bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka-angka. Dalam menggunakan metode ini, peneliti menggambarkan suatu keadaan dengan masalah ataupun gejala yang ada di lapangan dengan cara menjelaskan fakta yang sesungguhnya. Kemudian peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang berguna untuk mengetahui kejadian dan keadaan dilapangan yang menggambarkan fenomena sosial.

Dari paparan di atas dan berdasarkan latar belakang serta teori dan konsep maka penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Desa Makmur Jaya dan Masyarakat Makmur Jaya yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

1. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng kabupaten Kutai Timur, meliputi :
 - 1.1 Motivator
 - 1.2 Fasilitator
 - 1.3 Mobilisator
2. Kendala Peran Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Hasil Penelitian

Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur

Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Berdasarkan kepada hasil penelitian dilapangan melalui metode wawancara langsung dengan Kepala Desa Makmur Jaya dan warga Desa Makmur Jaya serta didasari pada hasil observasi/pengamatan langsung dilapangan. Bahwa peran kepala desa dalam hal memotivasi masyarakatnya dalam pembangunan desa adalah dengan cara mengundang atau mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam menentukan program-program desa. Karena dengan partisipasi masyarakat dalam mencanangkan program desa masyarakat akan lebih

paham apa yang dibutuhkan. Alasan Kepala Desa Makmur Jaya memotivasi masyarakat dengan mengundang dan ikut berpartisipasi dalam menentukan program-program pembangunan desa karena masyarakat lebih mengerti apa yang dibutuhkannya.

Kepala Desa Makmur Jaya dalam memotivasi masyarakatnya adalah memberi kesadaran kepada masyarakat mengingat betapa pentingnya sarana transportasi (jalan) ini. Dengan cara mengajak atau membuat suatu pertemuan dengan staf-staf desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa untuk membahas tentang pembangunan jalan, kemudian hasil dari pada pertemuan tersebut segera merespon bahwa masyarakat setuju dan siap berpartisipasi dalam pembangunan jalan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan melalui metode wawancara langsung dengan Kepala Desa Makmur Jaya dan ketua BPD, staf desa, sekertaris desa dan warga Desa makmur Jaya serta didasari pada hasil observasi/pengamatan langsung dilapangan. Maka Peran Kepala Desa Makmur Jaya dalam memotivasi masyarakat dalam pembangunan jalan dalam desa telah berjalan dengan cukup baik dan lancar.

Dari penjelasan kepala desa, juga sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Makmur Jaya Bapak Sakimun bahwa pelaksanaan pembangunan jalan. Kepala desa selalu mengajak atau membuat pertemuan dengan masyarakat desa untuk membahas tentang pembangunan jalan. Sehingga membuat masyarakat bisa termotivasi dan mau berpartisipasi pembangunan desa (jalan).

Kehidupan secara Gotong Royong yang merupakan warisan nenek moyang kita ternyata sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika kita sendiri semakin kepedesaan, maka jiwa gotong royong akan semakin terlihat nyata. Dan kita pun dapat membandingkannya dengan daerah perkotaan dimana jiwa atau rasa kegotong royongan ini telah hilang, yang sehubungan dengan meningkatnya keragaman penduduk kota. Maka kegiatan gotong royong hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya pada waktu pembersihan lingkungan desa, perbaikan jalan, rukun kematian, membuat rumah yang dilakukan secara gotong royong. Bahkan lebih dari itu dipedesaan hampir segala bentuk kegiatan baik itu untuk kepentingan umum maupun pribadi, apabila diperlukan tenaga banyak selalu ditempuh dengan gotong royong, misalnya membersihkan jalan di setiap gang dan membersihkan pos kamling.

Kepala Desa Makmur Jaya saat diwawancara mengenai bagaimana cara memotivasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan gotong royong, dirumahnya beliau mengatakan:

“Memotivasi masyarakat desa dalam kegiatan gotong royong yaitu akan dikenakan denda sebesar Rp.30.000 rupiah bagi masyarakat yang tidak ikut gotong royong. Cara ini untuk meningkatkan warga untuk mengikuti kegiatan gotong royong, dan denda tersebut sudah kesepakatan bersama

warga desa. Saya pun sebagai kepala desa ikut dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan secara masal atau bersama masyarakat dan kegiatan ini dilaksanakan dalam sebulan sekali. Dan uang denda tersebut di pegang oleh kaur pembangunan untuk pembangunan desa.” (Bapak Sujiman, pada tanggal 14 Februari 2018).

Dari hasil pengamatan dan pengalaman penulis bahwa kepala desa dalam memotivasi masyarakatnya adalah dengan dikenakan denda sebesar Rp.30.000 rupiah bagi masyarakat yang tidak ikut gotong royong. Sudah 170 orang (masyarakat) yang terkena biaya denda tersebut dari berlakukannya semenjak 2014 lalu. Hal ini dilakukan kepada setiap warganya untuk mengikuti kegiatan gotong royong, dan setelah masyarakat semua sudah berkumpul barulah memulai kegiatan gotong royong. Disini penulis memang melihat kenyataan bahwa kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam bergotong royong sangatlah kuat. Sehingga membuat masyarakatnya termotivasi dalam kegiatan gotong royong.

Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kepala desa sebagai fasilitator selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna seperti halnya tempat pertemuan. Seperti balai desa yang difasilitasi kepala desa guna membahas mengenai pembangunan-pembangunan untuk yang ada di Desa Makmur Jaya. Hal ini sangat membantu guna memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik di Desa Makmur Jaya.

Kepala desa sebagai fasilitator yaitu menyediakan tempat di balai desa. Dalam hal ini kepala desa mengundang seluruh masyarakat Desa Makmur Jaya untuk membahas mengenai pembangunan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan. Pada umumnya masyarakat desa mengusulkan program pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan baru, pengerasan jalan, pembuatan parit, jembatan sarana olahraga bagi masyarakat dan lain-lain. Kepala desa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di muatkan dalam program perencanaan pembangunan desa, dengan demikian pembangunan sesuai dengan apa yang di inginkan serta menjadi kebutuhan masyarakat dan diharapkan masyarakat. Kepala desa menyediakan peralatan untuk pembangunan seperti tempat penggilingan semen, alat berat agar dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pekerjaan dan menghemat tenaga masyarakat dalam bekerja.

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Makmur Jaya dan pengamatan langsung dilapangan bahwa Kepala Desa Makmur Jaya telah berupaya dalam melakukan usaha-usaha pembangunan sektor sarana dan prasarana transportasi (jalan) bagi masyarakat Desa Makmur Jaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Didasari pula hasil wawancara dengan warga Desa Makmur Jaya yaitu Bapak Supono dan Bapak Sakimun, walaupun masih terdapat kekurangan dalam memperbaiki jalan tetapi untuk fasilitas sudah cukup memadai. Keterlibatan

masyarakat setempat dalam setiap tahapan yaitu tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional dan pemeliharaan juga perlu dilakukan. Perlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan pedesaan akan memberikan beberapa dampak yaitu Kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan Keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Selanjutnya kemajuan pembangunan jalan di Desa Makmur Jaya tidak terlepas dari peran kepala desa yang selalu memberikan fasilitas berupa balai desa dan peralatan buat pertemuan serta alat berat dalam pembangunan jalan.

Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator

Dari hasil penelitian penulis dilapangan, melalui metode wawancara dengan Bapak Suradi, Sulis dan Ibu Erna, dan Bapak Bambang KAUR pembangunan Desa Makmur Jaya. Ternyata peran kepala desa dalam hal ini mengadakan rapat atau pertemuan di Desa Makmur Jaya berjalan dengan baik dan lancar. Dimana setiap ada masalah terutama masalah pembangunan Desa Makmur Jaya maka akan dengan segera dilaksanakan rapat atau pertemuan desa dengan melibatkan masyarakat Desa Makmur Jaya guna menyusun perencanaan pembangunan tersebut.

Bahwa Peran Kepala desa Makmur Jaya sebagai mobilisator, menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan kerja bakti dan menggerakkan masyarakat dalam pertemuan desa. Dalam mewujudkan pola hubungan kemitraan/kebersamaan, dan pengembangan program-program pembangunan secara partisipatif dan mandiri melalui rapat atau pertemuan desa antara pemerintah desa.

Pembangunan sarana dan prasarana jalan merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan dan pengembangan suatu daerah. Karena dengan adanya sarana dan prasarana jalan yang baik akan membuka akses jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Begitupun bagi daerah pedesaan, sarana dan prasarana jalan merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka memobilisasi masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian langsung dilapangan beserta wawancara penulis dengan beberapa informan dan *key informan* yaitu Kepala Desa Makmur Jaya sebelumnya. Bahwa pada kenyataannya yaitu baik diakses jalan maupun pembangunan lainnya sudah penulis lihat sendiri dilapangan seperti pembangunan Balai Desa, jembatan dan jalan yang sudah dibangunnya dengan baik dan lancar.

Dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Makmur Jaya mengenai masalah pembangunan prasarana jalan di Desa Makmur Jaya seperti yang telah dijabarkan di atas dan setelah penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan. Dapat penulis katakan bahwa dalam pembangunan peningkatan prasarana jalan pemerintah desa hal ini Kepala Desa Makmur Jaya telah melakukan torehan prestasi yang baik. Yang dapat dilihat adanya pembangunan

jalan yang dilakukan pada tahun 2017 lalu dimana ada perbaikan jalan sepanjang 2 km dari pemukiman warga menuju tempat perkebunan warga.

Hasil pembangunan dibidang prasarana jalan ini juga sangat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat Desa Makmur Jaya. Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang informan dari warga Desa Makmur Jaya yaitu Bapak Sakimun, Ade dan bapak Bambang. Dimana hasil wawancara tersebut bahwa kemajuan pembangunan bidang prasarana jalan tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat Desa Makmur Jaya dan peran aktif dari kepala desa dan Pemerintah Desa Makmur Jaya sendiri.

Kendala Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya

Pekerjaan

Kendala dalam hal pekerjaan biasanya dialami oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan selain sebagai petani/bekebun, dimana pekerjaan yang mereka miliki tidak dapat ditinggalkan atau diambil alih tanggung jawabkan kepada orang lain. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh bapak hendro beliau adalah seorang buruh pabrik yang jadwal kerjanya telah diatur oleh perusahaan, sehingga apabila beliau tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya akan diberi sanksi. Berikut pemaparan hasil wawancara.

“Saya dulu diundang mas waktu ada kegiatan desa seperti perencanaan program-program desa yang diadakan pemerintah desa, la saya pas waktu itu tidak bisa hadir karna saya masuk shift pagi, karena waktu itu undangannya itu sekitar jam 10.” (bapak hendro, pada 19 februari 2018)

Hal ini juga diperkuat melalui wawancara dengan Bapak Sujiman sebagai Kepala Desa Makmur Jaya mengutarakan:

“Salah satu kendala Pemerintah Desa dalam mencanangkan program-program desa ialah sibuknya masyarakat dengan pekerjaannya masyarakat lebih mementingkan kebun/pekerjaan demi kelangsungan hidup mereka, daripada ikut dalam menentukan program-program desa”.(Sujiman, pada tanggal 14 Februari 2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui penyelenggaraan pembangunan desa mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program desa, karena dengan partisipasi masyarakat dalam mencanangkan program desa masyarakat akan lebih paham apa yang dibutuhkan, namun dimana masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidup membutuhkan suatu pekerjaan. Sehingga program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam memotivasi masyarakat dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakat.

Peralatan

Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya. Tersediannya fasilitas atau

perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Dimana salah satu faktor itu adalah tersediannya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya.

Adapun penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Makmur Jaya Bapak Sujiman, beliau mengatakan:

“Dalam pembangunan, fasilitas sangat dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan desa dengan baik. Contohnya saja penyampaian pada saat rapat desa untuk membahas mengenai pembangunan desa. Warga kurang tertarik dan paham karena penyampaian hanya seperti orang berpidato, sehingga warga desa kurang tertarik dan memahami. Beda jika menggunakan peralatan seperti laptop karena bisa langsung dilihat materinya dan bisa ditampilkan mengenai apa saja yang akan dilakukan dalam pembangunan fisik (jalan). jadi peralatan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.” (Pada tanggal 27 Februari 2018)

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada Bapak Supono selaku warga Desa Makmur Jaya, beliau menyatakan:

“Menurut saya kegiatan pembangunan yang di peruntukan masyarakat dipengaruhi oleh ketersediannya peralatan. Misalnya dalam rapat desa akan berjalan lancar jika tersediannya tempat beserta peralatan tulis menulis misalnya Papan tulis, LCD, dan laptop yang digunakan dalam rapat. Tetapi pada saat melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas mengenai pembangunan fisik di Desa makmur Jaya, masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa karena hanya berupa penjelasan saja tanpa menggunakan papan tulis dan LCD sehingga masyarakat tidak begitu paham dan tertarik dengan. Hal ini juga berdampak pada program pembangunan di Desa Makmur Jaya.” (Pada tanggal 27 Februari 2018)

Dari penjelasan bapak Sujiman dan bapak Supono masih terdapat kendala di Desa Makmur Jaya, bahwa dalam melakukan rapat masyarakat tidak begitu paham karena tidak menggunakan layar LCD tetapi hanya melakukan penjelasan sehingga masyarakat tidak paham dengan penjelasan yang diberikan. Berbeda apabila kepala desa memberikan penjelasan dengan menggunakan LCD, proyektor dan laptop masyarakat lebih tertarik dan paham program pembangunan desa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dan berdampak pada partisipasi masyarakat.

Olehnya itu, dapat dilihat faktor kendala dalam memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan desa yaitu kurangnya peralatan dalam menunjang kelangsungan rapat. tetapi dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pertemuan dengan staf desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa sudah

berjalan cukup baik dimana masyarakat masih ada yang peduli untuk mengikuti rapat tersebut. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Makmur Jaya dalam mengatasi kendala tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari fokus sebagai berikut:
 - a. Peran kepala desa sebagai motivator, kepala desa memberikan dorongan kepada warga Desa Makmur Jaya agar berperan aktif dalam pembangunan di desa sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat.
 - b. Peran kepala desa sebagai fasilitator, kepala desa memberikan bantuan serta memfasilitasi melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam hal pembangunan seperti tempat pertemuan guna membahas mengenai pembangunan yang diperlukan di Desa Makmur Jaya. Selain tempat pertemuan, kepala desa memberikan peralatan-peralatan guna menunjang pembangunan serta untuk memajukan pembangunan fisik yang ada di Desa Makmur Jaya.
 - c. Mobilisator kepala desa sebagai penggerak terhadap aparaturnya desa maupun masyarakat sudah cukup baik, kepala desa sudah menjalankan tugas dan fungsinya untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Makmur Jaya, meskipun kepala desa belum bisa menggerakkan semua masyarakat yang ada di Desa Makmur Jaya tetapi sebagian besar masyarakat sudah dapat terlihat aktif dalam pembangunan.
 - d. Kendala Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya diantaranya dalam hal:
 - i. Pekerjaan, partisipasi masyarakat dalam mencanangkan program desa masyarakat akan lebih paham apa yang dibutuhkan, namun dimana masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidup membutuhkan suatu pekerjaan. Sehingga program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam memotivasi masyarakat dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakat.
 - ii. Peralatan, kendala di Desa Makmur Jaya dalam melakukan rapat masyarakat tidak begitu paham karena tidak menggunakan layar LCD, proyektor dan laptop. Tetapi hanya melakukan penjelasan sehingga masyarakat tidak paham dengan penjelasan yang diberikan. Olehnya itu, dapat dilihat faktor kendala dalam memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan desa yaitu kurangnya peralatan dalam menunjang kelangsungan rapat.

Saran

1. Diharapkan kedepannya kepala desa dalam menentukan jadwal undangan yang tepat, dalam artian hari yang dimana masyarakat tidak terbentur dengan pekerjaannya dalam pertemuan desa.
2. Serta menambah peralatan (alat elektronik) seperti LCD (*Liquid Crystal Display*), proyektor dan laptop yang lebih memadai lagi sehingga kedepannya peran dalam meningkatkan partisipasi pembangunan di Desa Makmur Jaya dapat dilaksanakan secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Efendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan. Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta: Depdiknas Bapenas Adicitakaryanusa
- H.A. Tilaar. 2009. Kekuasaan Pendidikan:Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta
- Hadi P.,Sudharto, 2001. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Muljana, B.S. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Replita V. Jakarta: UI-Press.2001
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga
- Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Pustaka karya
- Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Willie Wijaya. (2004). Kamus Lengkap Indonesia. Bintang Jaya: Semarang

Sumber Dokumen :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014